

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perwujudan pembangunan tidak hanya mengedepankan kesejahteraan di bidang ekonomi saja, namun keselarasan di berbagai bidang dengan memperhatikan aspek lingkungan sosial masyarakat yang kemudian mampu mendorong terciptanya keberlanjutan bagi pembangunan itu sendiri. Perluasan dan percepatan pembangunan nasional tidak bisa lepas dari strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pertumbuhan, tetapi juga pemerataan khususnya di tingkat regional, hal ini diwujudkan dengan era otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah melalui Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, telah terbuka kesempatan bagi setiap daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengembangkan setiap potensi daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pertumbuhan output baik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun PDRB perkapita yang menunjukkan pendapatan nyata yang diterima masyarakat. Peningkatan output perkapita dalam jangka panjang menggambarkan kesejahteraan yang diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Perekonomian yang semakin berkembang mengisyaratkan

pembangunan ekonomi yang erat kaitannya dengan upaya pengurangan atau peniadaan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran (Todaro dan Smith, 2011).

Perbedaan dan keterbatasan potensi dan sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya sosial yang dimiliki daerah menyebabkan kemampuan setiap daerah untuk membangun daerahnya masing-masing berbeda. Sehingga, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan secara optimal diperlukan penentuan prioritas pembangunan (Syafrizal, 2015).

Arsyad (1999) mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada melalui suatu pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja atau kesempatan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Sehingga, pemanfaatan serta pengelolaan sumber-sumber daya yang dimiliki secara optimal dan efisien dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pembangunan ekonomi daerah harus dirancang sedemikian rupa, sehingga menjamin penggunaan faktor-faktor produksi yang ada dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Pemilihan kebijakan pembangunan harus ditentukan atas dasar sifat dan tujuan yang berbeda-beda yang hendak dicapai (Suparmoko dan Irawan, 2002).

Hal terpenting dalam pengembangan pembangunan bagi pembangunan otonomi daerah adalah didasarkan pada keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif serta mengidentifikasi sektor-sektor unggulan suatu daerah dan

memanfaatkan sektor-sektor unggulan tersebut agar dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah (Melliyawanty, 2014).

Provinsi Bangka Belitung dikenal sebagai penghasil timah terbesar di dunia (Bangka Pos, 2008). Pemerintah Daerah Bangka Belitung dengan kewenangan otonomi yang dimiliki, mengeluarkan Perda No. 6 Tahun 2001 tentang pertambangan umum yang membuka kesempatan bagi masyarakat mengeksploitasi timah secara bebas. Selain mendorong mulai tumbuhnya perekonomian masyarakat, hal ini juga menimbulkan persoalan seperti pencemaran air, lahan tandus, abrasi pantai, dan kerusakan cagar alam yang sulit untuk diatasi. Proses eksplorasi pertambangan timah juga terjadi di wilayah Kabupaten Bangka, meskipun eksplorasi timah memberikan manfaat berupa Pemasukan Asli Daerah (PAD) tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan lingkungan. Lahan-lahan yang telah dieksplorasi hampir tak dapat dipergunakan lagi. Sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tinggi untuk mereklamasi sisa pertambangan (*kolong*) timah menjadi lingkungan yang asri kembali. Upaya untuk keluar dari ketergantungan terhadap pertambangan juga memunculkan persoalan seperti perlunya meyakinkan masyarakat untuk mulai beralih mata pencaharian dan meninggalkan pertambangan timah.

Banyaknya daerah pertambangan yang tersebar memberikan manfaat dan permasalahan tersendiri bagi pemerintah daerah, begitu pula dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka. Berdasarkan jumlah izin tambang, Kabupaten Bangka merupakan daerah yang memiliki jumlah IUP (Izin Usaha Pertambangan) produksi darat dan laut yang terbanyak yaitu sebanyak 306 unit dengan luas total

IUP (Izin Usaha Pertambangan) produksi seluas 120.828,26 ha. Sedangkan jumlah IUP (Izin Usaha Pertambangan) eksplorasi darat dan laut di Kabupaten Bangka sebanyak 24 unit dengan total luas IUP (Izin Usaha Pertambangan) eksplorasi sebesar 8.160,84 ha yang merupakan urutan kedua setelah Bangka Selatan yaitu 35 unit dengan luas 83.549,08 ha (Indonesia Tin Forum, 2013).

Dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh pembebasan pengelolaan lahan tambang mulai menimbulkan kekhawatiran, sehingga gagasan untuk mengupayakan terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan yang sekaligus mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi mulai dipertimbangkan. Selanjutnya penentuan sektor yang dapat menunjang pembangunan di Kabupaten Bangka setelah beralih dari pertambangan, dan menjadi sektor yang mampu menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat menjadi penting sebagai langkah awal untuk bangkit dari ketergantungan terhadap pertambangan.

Tabel 1.1.

Luas Daerah, Jumlah Pekerja, Pengangguran dan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Luas Daerah (Km ²)	Jenis Kegiatan		
		Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja
Bangka	2.950,68	132.128	12.053	144.181
Belitung	2.293,69	84.219	2.635	86.854
Bangka Barat	2.820,61	88.740	1.083	89.823
Bangka Tengah	2.126,37	74.102	4.430	78.532
Belitung Timur	2.506,91	58.259	1.562	59.821
Pangkal Pinang	118,8	84.575	8.204	92.779
Provinsi Kep. Babel	16.423,23	604.223	32.736	636.959

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kep. Babel (babel.bps.go.id), 2015

Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten dari tujuh kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan secara administratif wilayah Kabupaten Bangka berbatasan langsung dengan daratan wilayah Kota Pangkal Pinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung (Babel), Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Barat. Kabupaten Bangka terdiri dari delapan kecamatan yaitu Sungailiat sebagai ibukota, Bakam, Pemali, Merawang, Puding Besar, Mendo Barat, Belinyu, dan Riau Silip. Sebagaimana yang tertera pada tabel di atas (Tabel 1.1), dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya luas wilayah Kabupaten Bangka merupakan urutan kedua setelah Bangka Selatan yaitu seluas 2.950,68 km², dan dengan jumlah angkatan kerja terbanyak yaitu mencapai 144.181 jiwa terdiri dari jumlah orang yang bekerja sebanyak 132.128 jiwa, sedangkan pengangguran sebanyak 12.053 jiwa. Konsekuensi dari melimpahnya sumber daya manusia, selain sebagai aset juga menimbulkan persolan pengangguran yang perlu perhatian pemerintah.

Pengelolaan lahan dan pemanfaatan wilayah yang luas, dengan pemberdayaan sumber daya manusia yang dikelola secara tepat diharapkan menjadikan Kabupaten Bangka memiliki potensi sumber daya yang lebih banyak dibandingkan kabupaten lainnya.

Tabel 1.2.
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2009-2013(rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011'	2012*	2013**
Bangka	7.150.357	7.269.154	757.0325	7.852.295	8.113.837
Bangka Barat	14.820.378	15.058.430	15.580.586	16.134.679	16.665.381
Bangka Tengah	7.929.716	8.016.828	8.350.142	8.652.758	8.904.032
Bangka Selatan	7.693.409	7.896.133	8.244.713	8.455.247	8.637.340
Pangkal Pinang	7.198.507	7.368.813	7.674.470	7.955.187	8.232.388
Belitung	7.727.960	7.950.641	8.207.480	8.516.484	8.826.007
Belitung Timur	8.058.163	8.379.846	8.571.458	8.900.649	9.170.243
Prov.Kep.Babel	8.585.609	8.760.754	9.098.163	9.419.413	9.715.714

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kep. Babel (babel.bps.go.id), 2014

Catatan: 'Angka Diperbaiki, *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara

Dilihat dari pendapatan per kapita atas dasar harga konstan pada Tabel 1.2 Kabupaten Bangka merupakan kabupaten dengan pendapatan perkapita terendah selama kurun waktu 2009-2013 dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bangka memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak, namun pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Bangka mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 sebesar Rp7.150.357,00 menjadi Rp7.269.154,00 meningkat sebesar 1,66 persen, dan pada tahun 2011 pendapatan per kapita naik menjadi Rp7.570.325,00 atau meningkat sebesar 4,14 persen, sedangkan pada tahun 2012 pendapatan per kapita naik menjadi Rp7.852.295,00 atau mengalami kenaikan sebesar 3,72 persen, kemudian pada tahun 2013 pendapatan perkapita naik menjadi Rp8.113.837,00 atau naik sebesar 3,33 persen.

Kontribusi sektor ekonomi terhadap perekonomian Kabupaten Bangka dapat diketahui dari angka distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebagaimana tampak pada Tabel 1.3 di bawah ini. Berdasarkan Tabel 1.3, selama empat tahun sektor primer masih merupakan sektor ekonomi dominan di Kabupaten Bangka, yaitu terdiri dari sektor pertanian yang merupakan sektor ekonomi yang memberikan proporsi terbesar terhadap PDRB yaitu sebesar 22,34 persen pada tahun 2013 sedangkan di urutan kedua terdapat sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 19,58 persen yang sebelumnya pada tahun 2008 merupakan sektor ekonomi utama penggerak perekonomian. Selanjutnya, di urutan ketiga terdapat sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sebesar 19,28 persen pada tahun 2013 yang kemudian diikuti oleh sektor konstruksi dengan peningkatan proporsi cukup signifikan yaitu sebesar 18,15 persen tahun 2010 dan 19,28 pada tahun 2013.

Tabel 1.3.

Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka Tahun 2010-2013 (persen)

No	Lapangan Usaha	Tahun			
		2010	2011r	2012*	2013**
1	Pertanian	23,06	22,18	22,13	22,34
2	Pertambangan dan Penggalian	23,14	22,34	20,93	19,58
3	Industri Pengolahan	8,94	9,02	8,63	8,57
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,72	0,76	0,78	0,81
5	Konstruksi	9,87	10,41	11,17	11,55
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	18,15	19,00	19,18	19,28
8	Keuangan, Real estate, dan Jasa Perusahaan	2,00	2,12	2,22	2,22
9	Jasa-jasa	11,01	11,15	11,04	12,43
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00
	PDRB Tanpa Migas	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bangka Dalam Angka 2014 (bangkakap.bps.go.id)

Catatan: r Angka revisi, * Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara

Sektor primer dalam hal ini pertanian dan pertambangan menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun selama kurun waktu 2010-2013 yang disebabkan mulai berkurangnya lahan pertanian serta langkanya barang tambang. Sedangkan berkembangnya sektor industri dan konstruksi menunjukkan mulai tumbuhnya sektor sekunder dan tersier di Kabupaten Bangka.

Sektor pertambangan merupakan sektor yang akan terus menipis, terkuras dan berpotensi menjadi langka, mengingat sektor ini merupakan sektor yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Menyadari hal ini, maka secara perlahan pemerintah provinsi mulai memberdayakan sektor pariwisata dan pertanian sebagai sektor yang akan dijadikan sebagai sumber penghasilan daerah dan penghasilan masyarakat Bangka Belitung. Dipilihnya kedua sektor ini dikarenakan Provinsi Bangka Belitung memiliki objek-objek wisata laut yang sangat natural dan bagus, begitu juga dengan kondisi tanahnya yang subur (Valeriani, 2011).

Kesadaran akan pentingnya sektor pengganti untuk keluar dari ketergantungan terhadap pertambangan timah telah mendapat perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bangka dengan menyusun rancangan-rancangan terkait bagaimana mengelola wilayah Kabupaten Bangka menjadi daerah agropolitan dan minapolitan. Lahan-lahan yang ada pun akan difungsikan untuk menanam tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

Berdasarkan pada fenomena di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan tema "*Analisis Potensi Ekonomi, Kebutuhan Investasi dan Kebijakan*

Pembangunan Berbasis Sektor Unggulan di Kabupaten Bangka Periode 2010-2014”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Penulisan ini akan memfokuskan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan sekaligus sebagai sektor basis yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bangka, dan menganalisis daya saing Kabupaten Bangka terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari nilai *Differential Shift* analisis *Shift-Share*, kebutuhan investasi dari koefisien ICOR, dan kebijakan pembangunan yang berbasis sektor unggulan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu PDRB atas dasar harga konstan karena menunjukkan pertumbuhan riil setiap sektor dari tahun ke tahun, dalam hal ini menggunakan tahun dasar 2010 sesuai dengan Sistem Neraca Nasional (SNA/SNN) 2008 atas rekomendasi PBB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka periode 2010-2014.

Perubahan tahun dasar 2010 berimplikasi pada perubahan klasifikasi sektor ekonomi dari 9 sektor menjadi 17 sektor yaitu terdiri dari: (A) Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan; (B) Pertambangan dan Penggalian; (C) Industri Pengolahan; (D) Pengadaan Listrik dan Gas; (E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (F) Konstruksi; (G) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; (H) Transportasi dan Pergudangan; (I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (J) Informasi dan Komunikasi, (K) Jasa Keuangan dan Asuransi; (L) Real Estat; (M,N) Jasa Perusahaan; (O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib; (P) Jasa Pendidikan; (Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (R,S,T,U) Jasa lainnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Sektor apakah yang menjadi unggulan Kabupaten Bangka dan dapat menunjang perekonomian Kabupaten Bangka?
2. Bagaimana daya saing perekonomian Kabupaten Bangka terhadap perekonomian Bangka Belitung?
3. Seberapa besar tambahan kapital yang diperlukan untuk mencapai peningkatan satu unit produksi output di Kabupaten Bangka?
4. Bagaimana strategi kebijakan pembangunan Kabupaten Bangka yang berbasis sektor unggulan daerah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis sektor unggulan yang dapat menunjang perekonomian Kabupaten Bangka.
2. Untuk menganalisis daya saing perekonomian Kabupaten Bangka terhadap perekonomian Bangka Belitung.
3. Untuk menganalisis seberapa besar tambahan kapital yang diperlukan untuk mencapai peningkatan satu unit produksi output di Kabupaten Bangka.

4. Untuk menganalisis strategi kebijakan pembangunan Kabupaten Bangka yang berbasis sektor unggulan daerah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti.

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, dan merupakan penerapan ilmu yang telah ditekuni. Sehingga dengan demikian ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

2. Bagi Universitas dan Akademisi.

Hasil penelitian ini sebagai tambahan dan pelengkap kepustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian dengan tema yang sejenis, sehingga dapat berkontribusi terhadap pengembangan penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Pemerintah.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan strategi pembangunan di Kabupaten Bangka dengan berorientasi pada sektor yang menjadi basis ekonomi yang dapat menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru bagi masyarakat setelah keluar dari ketergantungan terhadap pertambangan sehingga mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.